

Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup, 21/11 (2016), 12-21  
**Relasi Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Dengan Kerusakan  
Lingkungan**

Dr. Ir. Hamzah Lubis, SH., M.Si  
Institut Teknologi Medan, Association of Diving Scholl International  
Anggota Dewan Daerah Perubahan Iklim Prov.Sumatera Utara  
E-mail: [hamzah\\_blh@yahoo.com](mailto:hamzah_blh@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*Entrepreneurs engaged in the management of natural resources have a social responsibility to the local environment. Active role of entrepreneurs to empower the local environment and community impacts positively on the communities and the sustainability of the company itself. This entrepreneur role relation research is conducted in Poncan Marine Resort, Sibolga. The research method is through observation, questionnaires and interviews involving relevant institution at the city scope, employees and tourists. The results shows that the role of entrepreneurs in economic empowerment (10.30%), social (9.0%) and culture (41.40%) is categorized "low". As a result, the capacity of the public (71%) and participation (15.90%) is also low. One of the consequences is dominant reef damages is caused by the public (90%). The coral reefs cover remains ranged from 27.83% to 29% with coral species from 15 to 16 types.*

*Keywords: Corporate roles, Community empowerment, Community capacity, Environmental damage*

**PENDAHULUAN**

Setiap pengusaha berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar lokasi usaha. Menurut Soekadijo (2010) terdapat empat aspek kewajiban pengusaha pariwisata. Aspek ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (*economy growth*), aspek sosial untuk menciptakan kesejahteraan sosial (*social progress*), aspek budaya untuk memperkenalkan kesenian dan kebudayaan (*cultural progress*) dan aspek lingkungan untuk mempertahankan tata kehidupan yang serasi dan seimbang (*ecological balance*). Spillane (1987) memasukkan aspek kecintaan pada tanah air.

Pengusaha pariwisata harus mengelola aspek ekonomi agar pariwisata memberi manfaat ganda (*multiplier effect*) pada sektor lainnya (Sugeng, 2007) seperti pada transportasi, komunikasi, jasa akomodasi, perdagangan, usaha makan minum, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan, peningkatan ekspor dan devisa negara (Hatmi, 1993; Suwanto, 2001; Pendit, 1995; Lubis, 2002). Mengembangkan sosial-budaya masyarakat lokal (Suwanto, 2001, Kamal, 2011) yang memiliki kekhususan (Beller, 1990) untuk menjadi sumber daya pariwisata. Dengan demikian pariwisata mendorong pelestarian dan pemanfaatan budaya (Pedit, 1995; Suwanto, 2001, Kamal,

2011), mengangkat harkat dan martabat masyarakat (Suwantoro, 2001) serta keperibadian bangsa dan cinta tanah air (Spillane, 1987). Pariwisata alam akan meningkatkan pelestarian lingkungan, program kebersihan dan kesehatan (Suwantoro, 2001; Pendit, 1995, Dahuri, 1993). Menurut Holthus (2000), pengusaha pariwisata sekarang ini telah menganggap penting pelestarian lingkungan dan akan mendapat perlawanan apabila melakukan perusakan lingkungan.

Pengusaha pariwisata (Sekneg, 2007a) memiliki tanggung jawab *corporate social responsibility* pada ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, pelayanan wisatawan dan pengelolaan lingkungan obyek wisata. Peran-peran pengusaha sebagai berikut:

a. Pemberdayaan ekonomi masyarakat

Pengusaha pariwisata memiliki 11 kewajiban dalam peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Kebijakan peningkatan kapasitas ekonomi diantaranya: pengembangan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi, mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, memberikan kesempatan kerja kepada tenaga kerja lokal, prioritas menjadi konsinyasi pariwisata, prioritas untuk ikut melakukan pengelolaan pariwisata. Perusahaan membantu peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, melakukan pelatihan usaha pariwisata, penanaman modal melalui kepemilikan saham (Sekneg, 2009, Depbudpar, 2004).

b. Pemberdayaan sosial masyarakat

Pengusaha pariwisata memiliki 10 kewajiban dalam peningkatan kapasitas sosial masyarakat. Kebijakan peningkatan kapasitas sosial diantaranya: berperan aktif dalam program pemberdayaan

masyarakat, saling menghargai dan menghormati antara pengusaha dan masyarakat, menyediakan sarana ibadah, melarang segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perjudian, prostitusi dan perdagangan narkoba di area pengusahaannya dan daerah sekitar, memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, memberikan informasi yang benar tentang usaha pariwisata dan mencegah kegiatan yang melanggar hukum dan segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan (Sekneg, 2009, Depbudpar, 2004).

c. Pemberdayaan budaya masyarakat

Pemerintah memberikan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional. Budaya lokal adalah salahsatu daya tarik pariwisata. Pelestarian dan pengembangan budaya akan meningkatkan kunjungan wisatawan yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan pengusaha dan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pengusaha pariwisata mempunyai 3 kewajiban peningkatan kapasitas budaya masyarakat lokal. Kewajiban tersebut adalah: menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dala masyarakat setempat, menjaga kelestarian lingkungan alam dan budaya dan menghormati nilai-nilai agama, adat istiadat dan tata nilai masyarakat di pulau dan sekitar pulau (Sekneg, 2009, Depbudpar, 2004).

d. Pelayanan wisatawan

Wisatawan memiliki dan dan kewajiban dalam pengelolaan pariwisata pulau kecil. Terdapat 14 hak wisatawan, diantaranya mendapat informasi yang akurat dan bertanggung jawab, pelayanan

yang tidak diskriminatif; mendapat kenyamanan, keramahan, perlindungan, keamanan dan keselamatan wisatawan, mendapat perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi misalnya wisata selam, mendapatkan tenaga kerja/pelayanan yang berkompentensi melalui pelatihan dan pendidikan, mendapatkan standar usaha, mendapatkan produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata yang berstandar dan bersertifikasi.

Terdapat pula 11 kewajiban wisatawan diantaranya menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, memelihara dan melestarikan lingkungan, menjaga ketertiban dan keamanan, mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum, melestarikan daya tarik wisata, menciptakan suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan di destinasi pariwisata (Sekneg, 2009, Depbudpar, 2004).

#### e. Pengelolaan lingkungan obyek wisata

Pengusaha pariwisata memiliki 59 kewajiban dalam pengelolaan lingkungan obyek pariwisata. Kebijakan pengelolaan lingkungan diantaranya: melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan, membayar ganti rugi atas kerusakan sumberdaya alam, membayar biaya pemulihan; melestarikan lingkungan dan budaya, daya tarik wisata dan destinasi wisata. Dilarang mengambil terumbu karang untuk bahan bangunan, ornamen aquarium, kerajinan tangan, bunga karang, melakukan pengerukan pasir reklamasi pantai.

Tersedianya fasilitas lingkungan seperti sanitasi, intilasi pengelolaan limbah cair, pengolahan limbah padat, konservasi sumber air tawar, pemeliharaan flora, fauna serta terumbu karang dan tidak melakukan introduksi biota dari luar pulau (Sekneg, 2009, 2009a, 2007, Depbudpar, 2004).

#### Masyarakat pesisir

Secara administratif masyarakat pesisir berdomisili di pulau kecil dan di kecamatan yang memiliki laut (Sekneg, 2007). Masyarakat pesisir identik dengan kemiskinan. Hal ini ditandai dengan lingkungan tempat tinggal yang kumuh, rendahnya aspirasi dan akses terhadap pelayanan sosial dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta bantuan sosial lainnya (Depsos, 2005). Ketidakberdayaan masyarakat sebagai hasil proses dehumanisasi oleh berbagai pihak (Kartasasmita, 1996). Untuk mengatasinya dengan pemberdayaan (*empowerment*) agar mampu membebaskan diri dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan untuk memperkuat posisi individu dan masyarakat dalam struktur kekuasaan (Kartasasmita, 1996, Lumbangaol, 2002).

#### Pemberdayaan masyarakat lokal

Pembangunan pariwisata bukan hanya masalah ekonomi (peningkatan pendapatan) tetapi juga masalah harkat dan martabat manusia (Kusumastanto, 2000). Oleh karena itu, pembangunan semestinya menjadi “pedagogi pembebasan” untuk meningkatkan harkat dan martabat bukan sebaliknya merendahkan harkat dan martabat manusia. Pembangunan sebagai proses penyadaran (*conscientization*) untuk menumbuhkan kesadaran kritis individu dan masyarakat tentang situasi lingkungannya dan kemampuannya

mengendalikan lingkungannya (Amien, 2005).

Pemberdayaan masyarakat berfungsi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat (Kartasasmita, 1996), dengan peningkatan kemampuan memanfaatkan dan memelihara sumberdaya pesisir serta meningkatkan aksesibilitas terhadap kegiatan ekonomi (Butar-butur, 1998). Peningkatan kemampuan diarahkan untuk menghasilkan daya (*power*) yaitu kekayaan, status sosial, pendidikan, penguasaan informasi dan ketrampilan. Untuk itu harus ada perbaikan akses masyarakat terhadap sumberdaya alam, teknologi, pasar dan pendanaan. Dengan pemberdayaan, maka masyarakat lokal tidak lagi menjadi obyek tetapi menjadi subyek pembangunan. Masyarakat lokal sebagai penguat bukan sebagai penopang berdirinya suatu usaha (Lumbangaol, 2002).

Dalam pemberdayaan masyarakat pesisir perlu dipahami adanya keunikan karakteristik nelayan yang bersifat sosiologis maupun bersifat ekologis. Sistem sosial masyarakat pesisir tergantung sebagian atau sepenuhnya pada kelimpahan sumberdaya pesisir dan laut (Adiwibowo, 1995). Demikian juga sistem ekologis pulau kecil yang rentan dengan kerusakan lingkungan (Fauzi, 2005). Oleh karena itu, pemberdayaan nelayan harus memakai prinsip-prinsip pemberdayaan yang sesuai karakteristik masyarakat pesisir. Tuwo (2011) menetapkan prinsip penciptaan lapangan kerja, sumber permodalan, sumber teknologi baru, pasar dan solidaritas serta aksi kolektif masyarakat. Satria (2002) menetapkan prinsip tujuan, pengetahuan dan penguatan nilai lokal, keberlanjutan (*sustainability*), ketepatan kelompok

asaran dan keselarasan. Pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kapasitas masyarakat.

Partisipasi masyarakat lokal

Partisipasi masyarakat dalam bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pulau kecil. Partisipasi masyarakat dipengaruhi persepsi masyarakat, pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Daerah dan pengusaha pariwisata.

Persepsi merupakan hasil proses penafsiran yang positif terhadap kebijakan dengan belajar dari pengalaman masyarakat selama ini. Persepsi yang tinggi diikuti dengan partisipasi yang tinggi (Lumbangaol, 2002). Terdapat 19 kebijakan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata pulau kecil. Kebijakan partisipasi dalam bentuk kewajiban dan larangan. Kewajiban tersebut diantaranya menjaga dan melestarikan daya tarik wisata, menciptakan suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata, mengendalikan pencemaran lingkungan hidup dan melestarikan plasma nuftah. Larangan masyarakat diantaranya: perusakan terumbu karang, lamun dan mangrove, mengambil terumbu karang, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, penambangan pasir, penambangan mineral, pembangunan fisik menimbulkan kerusakan lingkungan, kegiatan yang merusak pesisir pulau kecil (Sekneg, 2009, 2009a, 2007, Depbudpar, 2004).

## **METODA PENELITIAN**

Penelitian peran pengusaha dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan dilakukan pada perusahaan PT. Marine Resort yang mengelola kawasan

pariwisata Poncan Marine Resort di Pulau Poncan Gadang, Kota Sibolga. Metoda penelitian dengan observasi, quisoner dan wawancara. Responden adalah pimpinan intansi terkait di tingkat kota, pimpinan dan karyawan PT Sibolga Marine Resort, wisatawan dan masyarakat di sekitar lokasi usaha (Kota Sibolga).

## HASIL PENELITIAN

### Pengelolaan lingkungan obyek wisata

Pengelolaan lingkungan obyek wisata sangat rendah. Pengelolaan lingkungan berdasarkan penilaian pemerintah sebesar 39 persen sedangkan penilaian pengusaha sebesar 77,90 persen. Rendahnya pengelolaan lingkungan berkorelasi dengan rendahnya tutupan terumbu karang di lokasi obyek wisata. Tutupan dan jumlah jenis karang sebelum dan setelah menjadi obyek wisata tidak jauh berbeda. Tutupan karang tahun 1997 sebesar 27,83 persen (Efendi, 1997) dan tahun 2009 sebesar 29,00 persen (Coremap - LIPI, 2009). Jumlah jenis terumbu karang tahun 2006 (15 jenis) dan tahun 2009 sebanyak 16 jenis (Coremap - LIPI, 2006; 2009).

Rendahnya pengelolaan lingkungan karena pengusaha berorientasi profit tidak berorientasi lingkungan. Pengusaha hanya mengeksploitasi obyek wisata (Suparmoko, 1997, Sutiyanti, 2005) tidak menyisihkan sebagian keuntungan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan (Kusumastui, 2003). Kesenakahan semakin meningkat ketika Pemerintah Daerah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi berbiaya tinggi yang dikompensasikan pengusaha dengan mengekstrak sumberdaya alam secara berlebihan (Fauzi, 2005). Pengusaha pariwisata berorientasi pada pariwisata massal seperti Pulau Bali yang hanya

memperhitungkan jumlah kunjungan wisatawan tanpa peduli terhadap kondisi lingkungan dan sosial (Benyamin, 1997).

### Peningkatan ekonomi masyarakat

Hasil penelitian atas sebelas kewajiban pengusaha dalam pengembangan ekonomi masyarakat, menurut penilaian pemerintah daerah dan pengelola pariwisata sudah tinggi sedangkan penilaian masyarakat lokal rendah. Penilaian pemerintah dan pengusaha sudah terlaksana dengan baik sebesar 72,70 persen. Penilaian masyarakat lokal dengan dengan 3 isu utama yaitu penempatan tenaga kerja di perusahaan, pemasaran kerajinan lokal di ekowisata dan bantuan permodalan bagi masyarakat lokal hanya 10,30% baik. Penelitian Beyda (2000) pada lokasi yang berdekatan bahwa pengusaha tidak peduli dengan pengusaha kecil. Penelitian Sitanggang (2006) di Kota Sibolga menunjukkan bahwa penyebab masyarakat lokal sulit berkembang karena belum adanya investor yang bertindak sebagai mitra usaha bagi masyarakat lokal.

### Peningkatan sosial masyarakat

Pengusaha pariwisata Pulau Poncan Gadang memiliki 10 kewajiban dalam pengendalian dan peningkatan kehidupan sosial masyarakat lokal. Hasil penelitian berdasarkan penilaian Pemerintah Daerah dan pengusaha sudah tinggi sedangkan penilaian masyarakat lokal sangat rendah. Pengembangan sosial berdasarkan penilaian pemerintah sudah baik 90 persen dan penilaian pengusaha 100 persen. Penilaian masyarakat lokal dengan topik keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pariwisata, keterlibatan dalam Amdal/Ukl-UPL dan keterlibatan dalam pengelolaan pariwisata hanya 9

persen menyatakan baik. Pengendalian dan peningkatan sosial masyarakat yang rendah menyebabkan pariwisata berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat lokal (Dahuri, 1993)

#### Peningkatan budaya masyarakat

Masyarakat Kota Sibolga memiliki budaya yang khas. Perpaduan suku bangsa Batak Toba, Karo, Angkola, Mandiling, Pakpak, Nias, Melayu, Minangkabau, Aceh yang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda termasuk pola kekerabatan yang berbeda (*patrilineal* dan *matrilineal*) melahirkan masyarakat baru dengan sebutan “Masyarakat Pesisir” (Beydha, 2000). Masyarakat pesisir ini memiliki bahasa spesifik bahasa “Baiko-baiko” atau bahasa “Munak-munak” sebagai gabungan berbagai bahasa lokal, memiliki kesenian pesisir seperti “Sikambang”, makanan khas seperti “Sambam Pacak” dan budaya lainnya. Pelestarian bahasa dan budaya dengan mengemasnya kepentingan pariwisata (Tauhid, 2009).

Pelaksanaan pengembangan budaya lokal oleh pengusaha pariwisata berdasarkan penilaian Pemerintah Daerah dan pengusaha pariwisata sudah sangat tinggi (100 persen). Data ini sangat kontras dengan penilaian masyarakat lokal yang rendah. Dengan isu pemanfaatan kesenian lokal di obyek wisata hanya 41,40 persen menyatakan baik. Rendahnya partisipasi pengusaha menyebabkan seni dan budaya masyarakat lokal tidak berkembang dengan baik. Data ini menunjukkan bahwa pengusaha pariwisata gagal mengemas kebudayaan lokal yang tinggi untuk pariwisata (Tauhid, 2009) padahal wisatawan asing senang melihat penampilan budaya lokal (Sutiyanti, 2005).

#### Pengembangan kapasitas masyarakat

Kapasitas masyarakat bergantung pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Pemerintah Daerah dan pengusaha pariwisata. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah hanya 40,40 persen dan oleh pengusaha sebesar 10,43 persen (versi masyarakat). Rendahnya pemberdayaan masyarakat berkorelasi dengan rendahnya kapasitas masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan masyarakat hanya 35 persen. Pengetahuan yang rendah berhubungan dengan pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah berhubungan dengan pendapatan yang rendah (Budhiarta, 1999). Pengetahuan yang rendah berkorelasi dengan keberanian mendapatkan hak (18 persen) dan tindakan untuk mengatasi kerusakan lingkungan (15 persen). Penelitian Khazali (2002) menunjukkan pemberdayaan melalui pembinaan, pelatihan dan pemberian bantuan berkorelasi positif dengan partisipasi masyarakat. Kapasitas masyarakat yang rendah menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan pemerintah dan pengusaha gagal. Pada hal kapasitas masyarakat yang rendah menyebabkan partisipasi masyarakat yang rendah pula (Kartasasmita, 1996).

#### Partisipasi masyarakat lokal

Partisipasi masyarakat dipengaruhi persepsi dan kapasitas masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan persepsi masyarakat yang tinggi (74,50 persen) yang akan diikuti dengan partisipasi yang tinggi (Lumbangaol, 2002). Hasil penelitian bahwa dari 19 item kebijakan partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan baik hanya 15,90%. Persepsi yang tinggi dengan partisipasi yang rendah dari masyarakat karena masyarakat tidak dapat berpartisipasi

dalam obyek tersebut disebabkan ketidakmampuan masyarakat dan kondisi lingkungan yang tidak menunjang (Dipokusumo, 1999). Penelitian Kusumastuti (2003) di Kepulauan Seribu menunjukkan hal yang sama. Rendahnya partisipasi berhubungan terbalik dengan perusakan terumbu karang. Perusakan terumbu Pulau Poncan Gadang sebesar 90 persen disebabkan oleh masyarakat nelayan hanya 10 persen akibat sampah dan limbah domestik. Perusakan dengan peracunan 30 persen, penambangan 30 persen, pemboman 15 persen, jangkar 5 persen, bubu 5 persen dan jaring sebesar 5 persen (Lubis, 2009). Pemboman terumbu karang kendati *illegal* ternyata mendapatkan pendapatan maksimal bagi nelayan karena tidak punya pilihan lain (Soede, 2000). Kesalahan tidak boleh sepenuhnya dituduhkan pada masyarakat nelayan (Sitanggang, 2006). Pemerintah Daerah dan pengusaha pariwisata berperan dalam melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat yang akan membuahkan partisipasi yang tinggi.

## KESIMPULAN

1. Peningkatan ekonomi masyarakat lokal menurut pemerintah dan pengusaha mencapai 72,70 persen sedangkan penilaian masyarakat hanya sebesar 10,30 persen.
2. Peningkatan sosial masyarakat berdasarkan penilaian Pemerintah Daerah dan pengusaha mencapai 90,0 persen dan 100,0 persen sedangkan penilaian masyarakat hanya 9,0 persen.
3. Peningkatan budaya masyarakat berdasarkan penilaian Pemerintah Daerah dan pengusaha pariwisata sudah mencapai 100% sedangkan penilaian masyarakat hanya 41,40%.
4. Rendahnya pemberdayaan masyarakat berkorelasi dengan rendahnya kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pengusaha 10,43% akibatnya keberanian mendapatkan hak (18%) dan tindakan untuk berpartisipasi mengatasi kerusakan lingkungan (15%).
5. Partisipasi masyarakat dipengaruhi persepsi dan kapasitas masyarakat. Persepsi positif masyarakat 74,50% namun partisipasi masyarakat 15,90%.
6. Rendahnya pemberdayaan masyarakat berkorelasi dengan rendahnya partisipasi masyarakat termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Akibatnya perusakan terumbu karang oleh masyarakat (90%). Tutupan terumbu karang hanya berkisar 27,83% sampai 29,00% dengan jenis karang 16-16 jenis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amien, A.M. 2005. *Kemandirian Lokal: Konsepsi Pembangunan, Organisasi dan Pendidikan Dari Perspektif Sains Baru*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Adiwibowo, S. 1995. *Adaptasi Ekologi Masyarakat di Wilayah Pesisir*. Kursus Pelatihan Integrated Coastal Zone Planning and Management Angkatan-I, 3 April – 9 September 1995. Kerjasama ADB, Bakosurtanal, PPLH-IPB. Bogor
- Butar-Butar, M. 1998. *Pengembangan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Laut di Daerah*. Konferensi Nasional-I Pengelolaan Sumberdaya Pesisir tanggal 10-20 Maret 1998. Institut Pertanian Bogor. Bogor

- Benyamin, I.M. 1997. *Proses Pengembangan Wisata Alam dan Dampaknya Pada Lingkungan Terutama Pada Aspek Sosial dan Ekonom: Studi Kasus Pantai Bali*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor. Bogor
- Beydha, I. 2000. *Pengembangan Wilayah Daerah Tujuan Wisata Pandan dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah*. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara. Medan
- Budhiartha, A.A. G. 1999. *Kajian Pengembangan Pariwisata Bahari Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Nusa Lembangan Bali*, Tesis Program Pascasarjana, Insitut Pertanian Bogor, Bogor
- Beller, W. D' Ayala, Hein, P. 1990. *Sustainable Development and Environmetal Management of Small Islands*. UNESCO. Paris
- Dahuri, R. 1993. *Daya Duk.ung Lingkungan dan Pengembangan Pariwisata Bahari Berlekanjutan*. Seminar Nasional Manajemen Kawasan Pesisir Untuk Ekotourisme Dalam Rangka Dies Natalis ke-30 Insitut Pertanian Bogor. Program Studi Magister Manajemen, Insitut Pertanian Bogor, Bogor
- Dipokusumo, B. 1999. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Pada Pemukiman Lahan Kering di Provinsi Nusatenggara Barat*. Tesis. Program Pascasarjana Insitut Pertanian Bogor. Bogor
- Depsos, 2005. *Panduan Oprasional Program Pemberdayaan Fakir Miskin di Wilayah Pesisir Pantai*. Departemen Sosial-RI. Jakarta
- Depbudpar, 2004. *Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : km.67/um.001/MKP/2004 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil*. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta
- Efendi, Y., Indrawadi., Imam, S., Yennafri., Samsuardi., Yunaldi., Ofrijohan., Yan, S., Ferry, E., Abror., Era, S. 1997. *Laporan Penelitian Studi Kondisi Fisik dan Penyebaran Terumbu Karang di Pantai Barat Sumatera Utara*. Bappeda Provinsi Sumatera Utara – Posteri Puslitbang Oseanologi – LIPI, Medan
- Fauzi, A. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis dan Gagasan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Hatmi, S. 1993. *Analisa Pengembangan Daerah Pariwisata Desa Pantai Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu*. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Insitut Pertanian Bogor. Bogor
- Holthus, P. 2000. *Sustainable Management of Oceans and Coasts: The Rule of the Private Sector*. *Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources* Vol.3 No. 1, 2000. Center for Coastal and Marine Resources Studies, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Kamal, M. 2011. *Pengaruh Kebudayaan Terhadap Kegiatan Usaha Kepariwisataan*. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*. Vol.7 No. 1 Juni 2011. Akademi Pariwisata Medan. Medan Hal.99-107
- Khazali, M.; Dietrieck, G.B.; Victor, P.H.N. 2002. *Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Mangrove: Studi Kasus di Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa*



- Barat. *Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources*. Vol. 4 No. 3, 2002. Center for Coastal and Marine Resources Studies, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. CIDES. Jakarta
- Kusumastuti, D.S.R. 2003. *Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Pulau-Pulau Kecil di TNL Kepulauan Seribu*. PSL-Universitas Indonesia. Jakarta
- Lubis, H. 2002. *Pengelolaan Ekowisata Bahari di Pulau Unggas, Tapanuli Tengah*. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara. Medan
- Lubis, M.R.K. 2009. *Analisis Pengelolaan Terumbu Karang Untuk Pengembangan Ekowisata Bahari di Pulau Poncan Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Lumbangaol, R. 2002. *Kajian Pengelolaan Sumberdaya Pulau-Pulau Kecil: Studi Kasus Kepulauan Toba Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Pendit, N.S. 1995. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Satria, A. 2002. *Karakteristik Sistem Sosial Masyarakat Pesisir*. PKSPL-IPB. Bogor
- Suparmoko, M. 1997. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. BPFE-UGM, Yogyakarta
- Sutiyanti, S. M. 2005. Pengaruh Wisatawan Dalam Menjaga Kelestarian Obyek Wisata. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*. Vol.1 No. 2 Desember 2005. Akademi Pariwisata Medan. Medan
- Sitanggang, L.P. 2006. *Studi Pemamfaatan Ruang Untuk Pengembangan Pariwisata di Kawasan Pesisir Sibolga*. Tesis. Sekolah Pascasarjana, Insitut Pertanian Bogor. Bogor
- Soekadijo, R.G. 2010. *Anatomi Pariwisata: Memahami Pariwisata Sebagai Syatemic Linkage*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Spillane, J.J. 1987. *Parawisata Indonesia Sejarah dan Prosesnya*. Kanisius, Yokyakarta
- Sugeng, K.W dan Ngatemin. 2007. Potensi dan Prospek Industri Pariwisata Kota Sabang. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*. Vol.3 No. 2 Desember 2007.
- Soede, C.P.; H.S.J. Cesar; J.S. Pet. 2000. Economic Issues Related to Blast Fising on Indonesian Coral reefs. *Indonesian Journal of Coastal and Marine Resources* Vol.3 No. 2, 2000. Center for Coastal and Marine Resources Studies, Institut Pertanian Bogor, Bogor
- Suwantoro, G. 2001. *Dasar – Dasar Pariwisata*. Andi. Yokyakarta
- Sekneg, 2007. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- ....., 2007a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*. Sekretariat Negara. Jakarta
- ....., 2009, Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang *Kepariwisataaan*. Sekretariat Negara. Jakarta
- ....., 2009a. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Tauhid, B. 2007. Akuntabilitas Pariwisata Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah*

*Pariwisata*. Vol.3 No. 1 Juni 2007.  
Akademi Pariwisata Medan. Medan

Tuwo, A. 2011. *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut*. Brilian Internasional, Jakarta